

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember
2025

Jl Raya PLP, Tromol Pos 08

Curug – Tangerang 15810

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tangerang, 23 Januari 2026

Kepala Kantor Unit Penyelenggara

Bandar Udara Budiarto



IMRON JAZULI

NIP 19760711 199703 1 007

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	22
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	36
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	42
F. Pengungkapan Penting Lainnya	44
VI. Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tangerang, 23 Januari 2026

Kepala Kantor Unit Penyelenggara

Bandar Udara Budiarto



IMRON JAZULI

NIP. 19700711 199703 1 007

DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN

	Hal
Tabel 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2024 dan Per 31 Desember 2025	
Tabel 2 : Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025	
Tabel 3 : Penggolongan Kualitas Piutang	
Tabel 4 : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	
Tabel 5 : Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	
Tabel 6 : Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan Per 31 Desember 2025	
Tabel 7 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024 dan Per 31 Desember 2025	
Tabel 8 : Perbandingan Belanja Pegawai TA 2024 dan Per 31 Desember 2025	
Tabel 9 : Belanja Barang Per 31 Desember 2025	
Tabel 10 : Realisasi Belanja Modal n Per 31 Desember 2025	
Tabel 11 : Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2025	
Tabel 12 : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	
Tabel 13 : Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas	
Tabel 14 : Rincian Belanja Dibayar di Muka	
Tabel 15 : Rincian Piutang Bukan Pajak	
Tabel 16 : Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	
Tabel 17 : Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	
Tabel 18 : Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	
Tabel 19 : Rincian Persediaan	
Tabel 20 : Rincian Aset Tetap	
Tabel 21 : Rincian Saldo Tanah	
Tabel 22 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
Tabel 23 : Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	
Tabel 24 : Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	
Tabel 25 : Rincian Aset Lainnya	

Tabel 26	: Rincian Aset Tak Berwujud	
Tabel 27	: Rincian Kewajiban Jangka Pendek	
Tabel 28	: Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga	
Tabel 29	: Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan	
Tabel 30	: Rincian Pendapatan Diterima di Muka	
Tabel 31	: Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember Tahun 2025 dan 2024	
Tabel 32	: Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024	
Tabel 33	: Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024	
Tabel 34	: Rincian Beban Jasa Per 31 Desember 2025 dan 2024	
Tabel 35	: Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2025	
Tabel 36	: Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025	
Tabel 37	: Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Per 31 Desember 25 dan 2024	
Tabel 38	: Rincian Beban Bantuan Sosial Per Desember 2025 dan 2024	
Tabel 39	: Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per Desember 2025	
Tabel 40	: Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per Desember 2025	
Tabel 41	: Rincian Beban Lain-Lain Per 31 Desember 2025 dan 2024	
Tabel 42	: Rincian Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2025 dan 2024	
Tabel 43	: Rincian Pos Luar Biasa Per Desember 2025 dan 2024	
Tabel 44	: Rincian Koreksi Nilai Persediaan	
Tabel 45	: Rincian Koreksi Atas Beban	
Tabel 46	: Rincian Koreksi Atas Pendapatan	

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto per 31 Desember Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 3,301,274,185,- atau mencapai 130,15 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 2,536,442,000,-.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp 29,782,153,637- atau mencapai 82,97 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 35,897,001,000,-.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2025 dan 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2025 dan T.A 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	T.A 2025			T.A 2024
	Anggaran	Realisasi	% Real. Thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	2,536,442,000	3,301,274,185	130,15	1,895,050,943
Belanja Negara	35,897,001,000	29,782,153,637	82,97	62,888,250,778

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2025.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 11,549,031,035,260,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 18,402,344,- ; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 11,478,450,390,712,- ; Properti Investasi sebesar Rp. 68,721,250,000,- ; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp. 0,-; Aset tetap yang belum diregister Rp. 0; dan aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0,-

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp 0,-. Dan nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp 11,549,031,035,260,-.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	31-Dec-24	31-Dec-25	Kenaikan / Penurunan	
			Rp	%
ASET				
Aset Lancar	27,732,385	18,402,344	(9,330,041)	-50.70
Aset Tetap	11,510,013,120,210	11,478,450,390,712	(31,562,729,498)	-0.27
Properti Investasi	52,000,000,000	68,721,250,000	16,721,250,000	24.33
Piutang Jk Panjang	-	-	-	
Aset Tetap yang belum Diregister	-	-	-	
Aset Lainnya	1,885,646,616	1,840,992,204	(44,654,412)	
Jumlah Aset	11,563,926,499,211	11,549,031,035,260	(14,895,463,951)	-0.13
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jk Pendek	-	-	-	
Jumlah Kewajiban	-	-	-	
EKUITAS				
Ekuitas	11,563,926,499,211	11,549,031,035,260	(14,895,463,951)	-0.13
			-	

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit pos luar biasa, dan surplus/defisit LO.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 3,233,736,453,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 44,657,660,034,-, sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp (41,423,923,581,-). Kegiatan Non

Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp 46,239,013,- dan defisit sebesar Rp (41,377,684,568,-) sehingga entitas mengalami deficit LO sebesar Rp (41,377,684,568,-)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 11,563,926,499,211,- dikurangi deficit-LO sebesar Rp (41,377,684,568,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 1,341,165,- dan ditambah dengan transaksi antar entitas sebesar Rp. 26,480,879,452,- sehingga ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp. 11,549,031,035,260,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan akuntansi berbasis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Sedangkan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan akuntansi berbasis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA BUDIARTO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	CATATAN	TA 2025		% thd Anng	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.1.				
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	2,536,442,000	3,301,274,185	130.15	1,895,050,943
Jum Pendpt Negara & Hibah		2,536,442,000	3,301,274,185	130.15	1,895,050,943
B. Belanja Negara	B.2.				
1. Belanja Pegawai	B.2.1.	18,426,700,000	18,181,064,168	98.67	14,195,275,743
2. Belanja Barang	B.2.2.	16,612,633,000	11,224,066,869	67.56	12,100,863,089
3. Belanja Modal	B.2.3.	857,668,000	377,022,600	43.96	36,592,111,946
4. Belanja Sosial	B.2.4.	-	-		-
Jumlah Belanja Negara		35,897,001,000	29,782,153,637	82.97	62,888,250,778

II. NERACA

KANTOR BANDAR UDARA BUDIARTO
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2025

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2025
ASET			
ASET LANCAR	C.2.4		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.5	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan		0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas		0	0
Kas pada Badan Layanan Umum		0	0
Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum		0	0
Investasi Jangka Pendek Lainnya		0	0
Belanja Dibayar di Muka (prepaid)		0	0
Uang Muka Belanja (prepayment)		0	0
Piutang Bukan Pajak		19,973,000	16,955,120
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak		(99,865)	(84,776)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bag Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		0	0
Bag Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bag Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		0	0
Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum		0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	C.2.4.2	0	0
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum		0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum		0	0
Piutang Lainnya	0	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	0	0
Persediaan		7,859,250	1,532,000
Persediaan Badan Layanan Umum		0	0
Jumlah Aset Lancar		27,732,385	18,402,344
ASET TETAP			
Tanah		11,323,445,250,000	11,306,724,000
Peralatan dan Mesin		75,543,686,733	74,467,386,733
Gedung dan Bangunan		124,302,375,090	124,302,375,090
Jalan Irigasi dan Jaringan		454,622,721,333	454,938,243,933
Aset Tetap Lainnya		0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan		0	0
Tanah Badan Layanan Umum		0	0
Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum		0	0
Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum		0	0
Jalan Irigasi dan Jaringan Badan Layanan Umum		0	0
Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum		0	0

Konstruksi dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(70,827,613,714)	(70,904,161,654)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(23,601,019,731)	(26,825,496,240)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(373,472,279,501)	(384,251,957,150)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin – BLU	0	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan – BLU	0	0
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan – BLU	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya – BLU	0	0
Jumlah Aset Tetap	11,510,013,120,210	11,478,450,390,712
PIUTANG JANGKA PANJANG		
Tagihan Penjualan Angsuran	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran	0	0
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	0	0
Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jk Panjang Lainnya	0	0
Tagihan Penjualan Angsuran – BLU	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TPA – BLU	0	0
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi – BLU	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR – BLU	0	0
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0	0
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	0	0
Jumlah Piutang Jangka Panjang	0	0
PROPERTI INVESTASI		
Properti Investasi	52,000,000,000	68,721,250,000
ASET LAINNYA		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0
Aset Tak Berwujud	1,439,102,500	1,439,102,500
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0	0
Aset Tak Berwujud - Badan Layanan Umum	0	0
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	0	0
Dana Penjaminan	0	0
Dana Kelolaan	0	0
Aset Lain-lain	1,410,000,000	1,430,900,000
Aset Lain-lain Badan Layanan Umum	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(963,455,884)	(1,029,010,296)
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya – BLU	0	0
Jumlah Aset Lainnya	1,885,646,616	1,840,992,204
JUMLAH ASET	11,563,926,499,211	11,549,031,035,260
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang kepada Pihak Ketiga	999,594	0

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0	0
Utang yang Belum ditagihkan		0	0
Uang Muka dari KPPN		0	0
Pendapatan Diterima di Muka		0	0
Pendapatan yang Ditangguhkan		0	0
Utang Belanja		0	0
Utang Jangka Pendek Lainnya		0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya		0	0
Jumlah Kewajiban jangka Panjang		0	0
JUMLAH KEWAJIBAN		0	0
EKUITAS			
Ekuitas		11,563,926,499,211	11,549,031,035,260
Jumlah Ekuitas		11,563,926,499,211	11,549,031,035,260
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		11,563,926,499,211	11,549,031,035,260

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR BANDAR UDARA BUDIARTO
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 2024

Uraian	2025	2024	Kenaikan/(Penurunan)
KEGIATAN OPERASIONAL			
PNBP Lainnya	3,233,736,453	1,565,289,330	1,668,447,123
Pendapatan BLU	-	-	-
Pendapatan Hibah	-	-	-
Jumlah Pendapatan Operasional	3,233,736,453	1,565,289,330	1,668,447,123
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	18,181,064,168	14,195,275,743	3,985,788,425
Beban Persediaan	6,327,250	92,816,250	(86,489,000)
Beban Jasa	4,179,213,071	5,590,691,340	(1,411,478,269)
Beban Pemeliharaan	6,998,934,388	5,568,815,383	1,430,119,005
Beban Perjalanan Dinas	45,919,410	858,856,366	(812,936,956)
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-
Beban Bunga	-	-	-
Beban Subsidi	-	-	-
Beban Hibah	-	-	-
Beban Bantuan Sosial	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	15,246,116,971	17,480,915,369	(2,234,798,398)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	84,776	99,865	(15,089)
Beban Transfer	-	-	-
Beban Lain-lain	-	-	-
Jumlah Beban Operasional	44,657,660,034	43,787,470,316	870,189,718
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(41,423,923,581)	(42,222,180,986)	798,257,405
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	41,324,461	-	41,324,461
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	58,364,000	-	58,364,000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	17,039,539	-	17,039,539
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	41,324,461	-	41,324,461
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4,914,552	7,476,827	(2,562,275)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4,914,552	7,476,827	(2,562,275)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4,914,552	7,476,827	(2,562,275)
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	46,239,013	7,476,827	38,762,186
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa	-	-	-
Beban Luar Biasa	-	-	-
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(41,377,684,568)	(42,214,704,159)	837,019,591

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR UNIT PENYELENGGARAAN BANDAR UDARA BUDIARTO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

URAIAN	31-Dec-25	31-Dec-24
EKUITAS AWAL	11,563,926,499,211	11,548,231,928,110
SURPLUS/DEFISIT – LO	(41,377,684,568)	(42,214,704,159)
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN	-	-
Penyesuaian Nilai Aset	-	-
Penyesuaian Nilai Kewajiban	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	1,341,165	(3,083,924,575)
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	(3,426,182,361)
Lain-lain	1,341,165	342,257,786
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	26,480,879,452	60,993,199,835
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(14,895,463,951)	15,694,571,101
EKUITAS AKHIR	11,549,031,035,260	11,563,926,499,211

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KANTOR BANDAR UDARA BUDIARTO

Kantor Bandar Udara Budiarto didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan PMK 2005/PMK.011/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal. Berkedudukan di Jl. Raya PLP Curug - Tangerang, Kantor Bandar Udara Budiarto mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran Kantor Bandar Udara Budiarto diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Kantor Bandar Udara Budiarto berkomitmen dengan visi “ *mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui pembinaan akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.*”

Untuk mewujudkan visi tersebut Kantor Bandar Udara Budiarto melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pembinaan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian negara/Lembaga
- Membina secara efektif Kementerian negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplentasikan.
- Mengembangkan sistem pembinaan yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan per Desember Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Bandar Udara Budiarto. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4 Basis Akuntansi

Kantor Bandar Udara Budiarto menerapkan akuntansi dan pelaporan berbasis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta menerapkan akuntansi dan pelaporan berbasis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Akuntansi dan pelaporan berbasis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan akuntansi dan pelaporan berbasis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per Desember Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan

Laporan Keuangan Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi Jakarta I adalah sebagai berikut:

(1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

(3) Kebijakan Akuntansi atas Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Kebijakan Akuntansi atas Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau

konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Belanja diakui pada saat timbulnya kewajiban/terjadinya konsumsi aset/terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

(5) Kebijakan Akuntansi atas Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan

yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

(6) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika

diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat	10%

	Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun

Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun
--	---------

(10) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi dan pelaporan berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama pos-pos ekuitas dana pada Neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis akuntansi kas menuju akrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 3,301,274,185,- atau mencapai 130,15 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 2,536,442,000,- Pendapatan Negara dan Hibah Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN, Jasa, dan Pendapatan Lain-lain.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya dapat dilihat dalam Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31-Dec-25		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN	-	-	-
2. Pendapatan Jasa	2,536,442,000	3,301,274,185	130.15
3. Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	2,536,442,000	3,301,274,185	130.15

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNBP pada TA 2025 sebesar 42,60 % dari estimasi anggaran pendapatan PNBP TA 2024.

Pendapatan PNBP ini diantara lain adalah:

1. Aktivitas jasa sewa fasilitas gedung dan bangunan yang dikelola oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto;
2. Pendapatan jasa kebandarudaraan yang dikelola oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto.
3. Pendapatan lain-lain sebesar Rp. 0,- yang terdiri dari peneriaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu dan penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu.

Tabel 6
Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2025

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2024	REALISASI 31 Desember 2025	NAIK (TURUN) %
1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN	-	-	0.00
2. Pendapatan Jasa	1,895,050,943	3,301,274,185	42.60
3. Pendapatan Lain-lain	-	-	0.00
Jumlah Pendapatan	1,895,050,943	3,301,274,185	42.60

B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto pada per 31 Desember TA 2025 adalah sebesar Rp 29,782,153,637,- atau 82,97 persen dari anggaran senilai Rp 35,897,001,000,- Rincian Anggaran dan realisasi belanja TA 2024 tersaji pada Tabel 7.

Tabel 7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Desember TA 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	18,426,700,000	18,181,064,168	98.67
Belanja Barang	16,612,633,000	11,224,066,869	67.56
Belanja Modal	857,668,000	377,022,600	43.96
Bantuan Sosial	0	0	0
Total Belanja Kotor	35,897,001,000	29,782,153,637	82.97
Pengembalian Belanja			0
Belanja Netto	35,897,001,000	29,782,153,637	82.97

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto pada per Desember TA 2025 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS; Belanja Honorarium; Belanja Lembur; dan Belanja Vakasi.

Realisasi Belanja Pegawai per Desember TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 18,181,064,168,- dan Rp 14,195,275,743,- Berdasarkan Tabel 8, realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 28,08 % persen dari realisasi belanja TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan pegawai yang pindah dari satker lain.

Tabel 8
Perbandingan Belanja Pegawai per September TA 2025 dan TA 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	18,181,064,168	14,195,275,743	28.08
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	-
Belanja Honorarium	0	0	-
Belanja Lembur	-	-	-
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	18,181,064,168	14,195,275,743	28.08
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja Bersih	18,181,064,168	14,195,275,743	28.08

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 11,224,066,869,-

Berdasarkan Tabel 9, Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 9
Belanja Barang per 31 Desember 2025

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 Desember 2025
Belanja Barang Operasional	11,224,066,869
Belanja Barang Non Operasional	0
Belanja Jasa	-
Belanja Pemeliharaan	-
Belanja Barang Persediaan	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	-
Jumlah Belanja Kotor	11,224,066,869
Pengembalian Belanja	-
Jumlah Belanja Bersih	11,224,066,869

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 377,022,600,-

Berdasarkan Tabel 10, Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 10
Realisasi Belanja Modal TA 2025

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	377,022,600
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0
Belanja Modal Fisik Lainnya	0
Jumlah Belanja Kotor	377,022,600
Pengembalian Belanja Modal	0
Jumlah Belanja Bersih	377,022,600

B.2.4. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 adalah sebesar Rp. 0,-

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 18,402,344,- dan Rp. 27,732,385,-

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto per 31 Desember 2025 disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Aset Lancar	TA 2025	TA 2024
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp -	Rp -
2	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp -	Rp -
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	Rp -	Rp -
4	Belanja Dibayar di Muka	Rp -	Rp -
5	Piutang Bukan Pajak	Rp 16,870,344	Rp 19,873,135
6	Bag Lancar Tagihan TP/TGR	Rp -	Rp -
7	Persediaan	Rp 1,532,000	Rp 7,859,250
	Jumlah	Rp 18,402,344	Rp 27,732,385

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam Tabel 12.

Tabel 12
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Jenis	T.A. 2025	T.A. 2024
BANK MANDIRI	0	0
Uang Tunai	0	0
Jumlah	0	0

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar masing-masing Rp 0,- dan Rp. 0,- .

Kas di Rekening Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan di Rekening Bendahara Penerima selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,-

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas disajikan dalam Tabel 13.

Tabel 13
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

No	Jenis	T.A. 2025	T.A. 2024
1	Jasa Giro yang belum di setor ke kas negara	-	-
2	Pajak PPh yang Belum Disetor	-	-
3	Honor kegiatan yang belum dibagikan	-	-
4	Pengembalian Belanja belum disetor ke kas negara	-	-
Jumlah		-	-

Jumlah tersebut di atas telah diselesaikan dengan melakukan penyetoran dan penyerahan uang kepada pihak yang terkait yang berhak.

C.1.4. Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp 0,-. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani

anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Rincian Belanja Dibayar di Muka disajikan dalam Tabel 14.

Tabel 14
Rincian Belanja Dibayar di Muka

Jenis	T.A. 2024	T.A. 2023
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

C.1.5. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 16,870,344,- dan Rp. 19,873,135,-. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan dalam Tabel 15.

Tabel 15
Rincian Piutang Bukan Pajak

No	Uraian	Per T.A. 2025	T.A 2024
1	Piutang Bukan Pajak	16,955,120	19,973,000
2		-	-
3		-	-
4		-	-
	Jumlah	16,955,120	19,973,000

C.1.6. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan piutang tak tertagih – piutang bukan pajak 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 84,776,- dan Rp. 99,865,-.

Penyisihan piutang tak tertagih - piutang bukan pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing debitor. Rincian estimasi penyisihan sebagaimana tersaji pada Tabel 16.

Tabel 16
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	%	Nilai Penyisihan
PT. GLOBAL AVIASI		14,838,520		74,193
WIDIASTUTI		662,000		3,310
PT. ADMIRAL DIRGANTARA MANDIRI		436,000		2,180
PT. AVIATERRA DINAMIKA		483,600		2,418

C.1.7. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp. 0,-. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR tersaji dalam Tabel 17 merupakan tagihan kepada bendaharawan.

Tabel 17
Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No	Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023
1		-	-
2		-	-
Jumlah		-	-

Sedangkan mutasi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	0
Mutasi tambah:	
Bag Lancar Tagihan TP/TGR 2025	0
Mutasi kurang:	
Pelunasan tahun 2024	0
Saldo per 31 Desember 2024	0

C.1.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) T.A 2024 adalah sebesar Rp 0,-.

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Rincian estimasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) tersaji pada Tabel 18.

Tabel 18
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	%	Nilai Penyusutan
		-	0,00%	-
		-	0,00%	-
Jumlah				-

C.1.9 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 1,532,000,- dan Rp. 7,859,250,-.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 tersaji pada Tabel 19.

Tabel 19
Rincian Persediaan

No	Persediaan	TA 2025	TA 2024
1	Barang Konsumsi	1,532,000	7,859,250
2	Barang untuk Pemeliharaan	-	-
3	Suku Cadang	-	-
5	Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah		1,532,000	7,859,250

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Atas barang konsumsi senilai Rp 1,532,000,- dan suku cadang Rp. 0,-.

C.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan T.A 2024 tersaji sebesar Rp. 11,478,450,390,712,- dan Rp. 11,510,013,120,210,-. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap Kantor Bandar Udara Budiarto per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada Tabel 20.

Tabel 20
Rincian Aset Tetap

No	Jenis	T.A 2025	T.A. 2024
1	Tanah	11,306,724,000,000	11,323,445,250,000
2	Peralatan dan Mesin	74,467,386,733	75,543,686,733
3	Gedung dan Bangunan	124,302,375,090	124,302,375,090
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	454,938,243,933	454,622,721,333
5	Aset Tetap Lainnya	-	-
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
Jumlah		11,960,432,005,756	11,977,914,033,156
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(481,981,615,044)	(467,900,912,946)
Nilai Buku Aset Tetap		11,478,450,390,712	11,510,013,120,210

C.2.1. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto Curug - Tangerang per 31 Desember 2025 dan T.A 2024 adalah sebesar Rp. 11,306,724,000,000,- dan Rp. 11,323,445,250,000,-.. Aset berupa Tanah tersebut terletak di Jl. Raya PLP Curug Tangerang. Rincian saldo tanah per Desember 2025 disajikan pada Tabel 21.

Tabel 21
Rincian Saldo Tanah

Tanah	Luas	Nilai
Desa Caringin	548,700	1,783,275,000,000
Desa Palasari	435,400	1,415,050,000,000
Desa Serdang Wetan	1,093,696	3,554,512,000,000
Desa Rancagong	1,405,164	4,553,887,000,000
Jumlah		11,306,724,000,000

Tanah seluas 3,484,137 m2 yang terletak di Desa Caringin, Desa Palasari, Desa Serdang Wetan, dan Desa Rancagong pada tanggal pelaporan per Desember 2024. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto Curug - Tangerang telah melakukan usaha-usaha dalam rangka pengamanan BMN tersebut, antara lain dengan membentuk tim pengamanan dan penyelesaian BMN, melakukan koordinasi aktif dengan Biro Umum Kantor Pusat, KPKNL dan DJKN, Kementerian Keuangan.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp. 74,467,386,733,- dan Rp. 75,543,686,733,-.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024		75,543,686,733
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:		
Reklasifikasi keluar	Rp	1,076,300,000
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
Penghapusan		
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	74,467,386,733
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	Rp	70,904,161,654
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	3,563,225,079

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp. 124,302,375,090,- dan Rp. 124,302,375,090,-.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024	124,302,375,090
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
Reklasifikasi Masuk	-
Saldo Awal	-
Penyelesaian Pembangunan Langsung	
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2025	124,302,375,090
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	26,825,496,240

Transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 454,938,243,933,- dan Rp. 454,622,721,333,-.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	454,938,243,933
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	
Reklasifikasi Masuk	
Penyelesaian Pembangunan Langsung	
Mutasi Kurang:	
Transfer Keluar	
Reklasifikasi Keluar	
Saldo per 31 Desember 2025	454,938,243,933
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	384,251,957,150
Nilai Buku per 31 Desember 2024	70,686,286,783

Transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp. 1,840,992,204,- dan Rp. 1,885,646,616,- .

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,-.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp. 481,981,615,044,- dan Rp. 467,900,912,946,- .

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). .

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset per 31 Desember 2025 disajikan pada Tabel 22, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Tabel 22
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 74,467,386,733	Rp 70,904,161,654	Rp 3,563,225,079
2	Gedung dan Bangunan	Rp 124,302,375,090	Rp 26,825,496,240	Rp 97,476,878,850
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 454,938,243,933	Rp 384,251,957,150	Rp 70,686,286,783
4	Aset Tetap Lainnya	Rp 1,840,992,204	Rp -	Rp 1,840,992,204
Akumulasi Penyusutan		Rp 655,548,997,960	Rp 481,981,615,044	Rp 173,567,382,916

C.3 Piutang Jangka Panjang

C.3.1 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 0,-. dan Rp. 0,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 disajikan pada Tabel 23.

Tabel 23
Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No.	Debitur	Jumlah
1		Rp0,00
2		Rp0,00
	Jumlah	Rp0,00

Sedangkan mutasi (TP/TGR) pada tahun T.A 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp0.00
Mutasi tambah:	
- TGR	Rp0.00
Mutasi kurang:	
- Reklasifikasi menjadi Bagian Lancar TP/TGR	Rp0.00
Saldo per 31 Desember 2025	Rp0.00

C.3.2 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk masing-masing debitur disajikan pada Tabel 24.

Tabel 24
Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
		-	0,5%	-
		-	0,5%	-
Total				-

C.4 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp. 1,840,992,204,- dan Rp. 1,885,646,616,-. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Rincian Aset Lainnya disajikan pada Tabel 25.

Tabel 25
Rincian Aset Lainnya

No.	Uraian	2025	2024
1	Aset Tak Berwujud	Rp 1,439,102,500	Rp 1,439,102,500
2	Aset Lain-Lain	Rp 1,430,900,000	Rp 1,410,000,000
Jumlah		Rp 2,870,002,500	Rp 2,849,102,500
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		Rp (1,029,010,296)	Rp (963,455,884)
Nilai Buku per 31 Desember 2025		Rp 1,840,992,204	Rp 1,885,646,616

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah

Rp. 1,439,102,500,- dan Rp. 1,439,102,500,-

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Rincian Aset Tak Berwujud T.A 2025 disajikan pada Tabel 26.

Tabel 26
Rincian Aset tak Berwujud

No.	Uraian	Nilai
1	Rencana induk termasuk KKOP,BKK,DLKr,DLKp	Rp 1.439.102.500
Jumlah		Rp 1.439.102.500

C.4.2. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp. 1,430,900,000,- dan Rp. 1,410,000,000,-.

Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	Rp -
- penghapusan BMN	Rp -
Saldo per 31 Desember 2024	Rp 1,430,900,000
Akumulasi Penyusutan	Rp (1,029,010,296)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp 401,889,704

KEWAJIBAN

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 tersaji sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah

tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto per 31 Desember 2025 disajikan pada Tabel 27.

Tabel 27
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No.	Aset Lancar	Jumlah
1	Utang kepada Pihak Ketiga	Rp -
2	Uang Muka dari KPPN	Rp -
3	Utang Yang belum ditagihkan	Rp -
4	Pendapatan Diterima di Muka	Rp -
	Jumlah	Rp -

C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 0,-. dan Rp. 0,-.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto per tanggal pelaporan disajikan pada Tabel 28.

Tabel 28
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Rp -	
2	Belanja barang yang masih harus dibayar	Rp -	
3	Utang kepada Pihak ketiga lainnya	Rp -	
	Total	Rp -	

C.5.2 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 0,-. dan Rp. 0,-

Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal

pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.5.3 Pendapatan yang Ditangguhkan

Nilai Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan Pendapatan Negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBPN, pengembalian belanja, serta pungutan/potongan pajak yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal 31 Desember 2025

Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto per tanggal pelaporan disajikan pada Tabel 29.

Tabel 29.
Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan PNBPN	Rp -
2	PPH yang belum disetor	Rp -
3	PPN yang belum disetor	Rp -
Total		Rp -

C.5.4 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan pada Tabel 30.

Tabel 30 .
Rincian Pendapatan Diterima di Muka

No	Uraian	2024
1		Rp -
2		Rp -
3		Rp -
Total		Rp -

EKUITAS

C.6 Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 11,549,031,035,260,- dan Rp. 11,563,926,499,211,-.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 3,233,736,453,- dan Rp. 1,565,289,330,- Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 31.
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	T.A 2025	T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	3,233,736,453	1,565,298,330	206.59
Pendapatan Lain-lain	-	-	
Jumlah	3,233,736,453	1,565,298,330	206.59

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari PJP4U, sewa fasilitas dan ijin masuk kawasan terbatas bandara. Sedangkan Pendapatan Lain-Lain-LO merupakan pengembalian belanja pegawai dan belanja lainnya yang berasal dari transaksi tahun 2025.

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 18,181,064,168,- dan Rp. 14,195,275,743,- Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 32.
Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-25	31-Dec-24
Beban Gaji	8,112,296,038	6,480,424,475
Beban Tunjangan-Tunjangan	8,239,547,130	6,487,797,268
Beban Uang Makan	1,281,753,000	891,965,000
Beban Lembur	547,468,000	335,089,000
Jumlah	18,181,064,168	14,195,275,743

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 6,327,250,- dan Rp. 92,816,250,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan

maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Suku Cadang Tahun 2025 sebesar Rp. 0,- dan Tahun 2024 sebesar Rp. 0,- tidak tercantum pada Beban Persediaan karena belum dilakukan revisi akun Suku Cadang ke akun Persediaan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 33.
Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	T.A. 2025	T.A. 2024
Beban Persediaan Konsumsi	6,327,250	92,816,250
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah Beban Persediaan	6,327,250	92,816,250

D.4 Beban Jasa

Jumlah Beban Jasa Per 31 Desember Tahun 2025 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 4,179,213,071,- dan Rp 5,590,691,340,-. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk Periode 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 34.
Rincian Beban Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024
Beban Keperluan Perkantoran	2,667,571,470	3,175,412,100
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	10,000,000
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,000,000	12,000,000
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	218,520,000	139,890,000
Beban Barang Operasional Lainnya	174,933,300	818,147,500
Beban Bahan	39,281,000	272,531,000
Beban Barang Non Operasional	10,000,000	0
Beban Langganan Listrik	869,972,627	992,016,496
Beban Langganan Telepon	55,654,532	51,548,115
Beban Langganan Air	52,330,000	0
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	88,950,142	119,146,129
Jumlah	4,179,213,071	5,590,691,340

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 6,998,934,388,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 35.
Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2024

URAIAN JENIS BEBAN	T.A. 2025
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,664,032,837
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,347,954,352
Beban Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan	2,986,947,199
Beban Pemeliharaan Lainnya	0
Belanja Modal BLU	
Jumlah	6,998,934,388

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.45,919,410. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 36.
Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025

URAIAN JENIS BEBAN	T.A. 2025
Beban Perjalanan Biasa	28,258,850
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	17,660,560
Jumlah	45,919,410

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 37.
Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	Desember 2025	Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 38.
Rincian Beban Bantuan Sosial per Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 15,246,116,971,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 39.
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per Desember 2025

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Dec-25
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,152,847,940
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3,224,476,509
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	10,824,138,110
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	44,654,412
Jumlah Penyusutan	
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	
Beban Penyusutan aset lain-lain	
Jumlah Amortisasi	
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	15,246,116,971

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per Desember 2025 adalah sebesar Rp.- 99,865,-. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 40.
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per Desember 2025

URAIAN JENIS BEBAN	Dec-25
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek	84,776
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Panjang	-
Jumlah	84,776

D.11. Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 41.
Rincian Beban Lain-lain 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin		-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan		-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya		-	-
Jumlah		-	-

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 42.
Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 dan 2024

Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Penjualan Alat Kantor	0	0	-
Defisit Selisih Kurs	0	0	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0	-

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 43.
Rincian Pos Luar Biasa per Desember 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
Jumlah		-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 11,563,926,499,211,- dan Rp. 11,548,231,928,110,-.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. (41,377,684,568,-) dan Rp. (42,214,704,159,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode 31 Desember tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode 31 Desember tahun 2025 adalah sebagai berikut:

*Tabel 44.
Rincian Koreksi Nilai Persediaan*

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Barang Persediaan Lainnya	-
Jumlah	-

E.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode 30 Desember tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. (3,426,182,361,-). Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan.

E.5 Koreksi Atas Beban

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing

sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Rincian untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

*Tabel 45.
Rincian Koreksi Atas Beban*

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Beban Pegawai	-
Beban Jasa	-
Jumlah	-

E.6 Koreksi Atas Pendapatan

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

*Tabel 46.
Rincian Koreksi Atas Pendapatan*

Jenis Pendapatan	Koreksi
Pendapatan Jasa Pelatihan	-
Pendapatan Lainnya	-
Jumlah	-

E.7 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 11,549,031,035,260,- dan Rp. 11,563,926,499,211,-

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada pengungkapan lain – lain.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Tidak ada pengungkapan lain – lain.

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
SATUAN KERJA : (413828) KANTOR UPBU BUDIARTO

Tgl Data : 22/01/26 1:54 AM

Tgl Cetak : 22/01/26 7:20 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	3,233,736,453	1,565,289,330	1,668,447,123	106.59
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	3,233,736,453	1,565,289,330	1,668,447,123	106.59
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	3,233,736,453	1,565,289,330	1,668,447,123	106.59
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	18,181,064,168	14,195,275,743	3,985,788,425	28.078
Beban Persediaan	6,327,250	92,816,250	(86,489,000)	(93.183)
Beban Barang dan Jasa	4,179,213,071	5,590,691,340	(1,411,478,269)	(25.247)
Beban Pemeliharaan	6,998,934,388	5,568,815,383	1,430,119,005	25.681
Beban Perjalanan Dinas	45,919,410	858,856,366	(812,936,956)	(94.653)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 ESELON I : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
 WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
 SATUAN KERJA : (413828) KANTOR UPBU BUDIARTO

Tgl Data : 22/01/26 1:54 AM

Tgl Cetak : 22/01/26 7:20 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	15,246,116,971	17,480,915,369	(2,234,798,398)	(12.784)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	84,776	99,865	(15,089)	(15.109)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	44,657,660,034	43,787,470,316	870,189,718	1.987
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(41,423,923,581)	(42,222,180,986)	798,257,405	(1.891)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	41,324,461	0	41,324,461	
Pendapatan Pelepasan Aset	58,364,000	0	58,364,000	
Beban Pelepasan Aset	17,039,539	0	17,039,539	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4,914,552	7,476,827	(2,562,275)	(34.27)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4,914,552	7,476,827	(2,562,275)	(34.27)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	46,239,013	7,476,827	38,762,186	518.431
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(41,377,684,568)	(42,214,704,159)	837,019,591	(1.983)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(41,377,684,568)	(42,214,704,159)	837,019,591	(1.983)

Keterangan :
FINAL

TANGERANG, 22 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA



IMROH MAZULI
NIP 197002111997031007

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
 WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
 SATUAN KERJA : (413828) KANTOR UPBU BUDIARTO

Tgl Data : 22/01/26 12:39 AM

Tgl Cetak : 22/01/26 7:20 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	11,563,926,499,211	11,548,231,928,110	15,694,571,101	0.14
SURPLUS/DEFISIT-LO	(41,377,684,568)	(42,214,704,159)	837,019,591	(1.98)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	1,341,165	(3,083,924,575)	3,085,265,740	(100.04)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	(3,426,182,361)	3,426,182,361	(100)
LAIN-LAIN	1,341,165	342,257,786	(340,916,621)	(99.61)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	26,480,879,452	60,993,199,835	(34,512,320,383)	(56.58)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(14,895,463,951)	15,694,571,101	(30,590,035,052)	(194.91)
EKUITAS AKHIR	11,549,031,035,260	11,563,926,499,211	(14,895,463,951)	(0.13)

Keterangan :

FINAL

TANGERANG, 22 Januari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA



IRFON UZULI

NIP 197007111997031007

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022
ESELON I : DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 05
SATUAN KERJA : KANTOR UPBU BUDIARTO 413828

Tgl Data : 22/01/26 1:54 AM
Tgl Cetak : 22/01/26 7:21 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,536,442,000	3,301,274,185	764,832,185	130.15	2,037,817,000	1,895,050,943	(142,766,057)	92.99
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,536,442,000	3,301,274,185	764,832,185	130.15	2,037,817,000	1,895,050,943	(142,766,057)	92.99
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	2,536,442,000	3,301,274,185	764,832,185	130.15	2,037,817,000	1,895,050,943	(142,766,057)	92.99
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	35,897,001,000	29,782,153,637	(6,114,847,363)	82.97	63,515,204,000	62,888,250,778	(626,953,222)	99.01
1. Belanja Pegawai	18,426,700,000	18,181,064,168	(245,635,832)	98.67	14,209,335,000	14,195,275,743	(14,059,257)	99.9
2. Belanja Barang	16,612,633,000	11,224,066,869	(5,388,566,131)	67.56	12,713,369,000	12,100,863,089	(612,505,911)	95.18
3. Belanja Modal	857,668,000	377,022,600	(480,645,400)	43.96	36,592,500,000	36,592,111,946	(388,054)	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022
ESELON I : DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 05
SATUAN KERJA : KANTOR UPBU BUDIARTO 413828



Tgl Data : 22/01/26 1:54 AM
Tgl Cetak : 22/01/26 7:21 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	35,897,001,000	29,782,153,637	(6,114,847,363)	82.97	63,515,204,000	62,888,250,778	(626,953,222)	99.01
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL
TANGERANG, 22 Januari 2026
Peranggung Jawab UAKPA
KPA



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
 WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
 SATUAN KERJA : (413828) KANTOR UPBU BUDIARTO

Tgl Data : 22/01/26 1:54 AM
 Tgl Cetak : 22/01/26 7:21 AM
 Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	16,955,120	19,973,000	(3,017,880)	(15.11)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(84,776)	(99,865)	15,089	(15.11)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	16,870,344	19,873,135	(3,002,791)	(15.11)
Persediaan	1,532,000	7,859,250	(6,327,250)	(80.51)
JUMLAH ASET LANCAR	18,402,344	27,732,385	(9,330,041)	(33.64)
ASET TETAP				
Tanah	11,306,724,000,000	11,323,445,250,000	(16,721,250,000)	(0.15)
Peralatan dan Mesin	74,467,386,733	75,543,686,733	(1,076,300,000)	(1.42)
Gedung dan Bangunan	124,302,375,090	124,302,375,090	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	454,938,243,933	454,622,721,333	315,522,600	0.07
AKUMULASI PENYUSUTAN	(481,981,615,044)	(467,900,912,946)	(14,080,702,098)	3.01
JUMLAH ASET TETAP	11,478,450,390,712	11,510,013,120,210	(31,562,729,498)	(0.27)
Properti Investasi				
Properti Investasi	68,721,250,000	52,000,000,000	16,721,250,000	32.16
JUMLAH Properti Investasi	68,721,250,000	52,000,000,000	16,721,250,000	32.16
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	1,439,102,500	1,439,102,500	0	0.00
Aset Lain-lain	1,430,900,000	1,410,000,000	20,900,000	1.48
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(1,029,010,296)	(963,455,884)	(65,554,412)	6.80
JUMLAH ASET LAINNYA	1,840,992,204	1,885,646,616	(44,654,412)	(2.37)
JUMLAH ASET	11,549,031,035,260	11,563,926,499,211	(14,895,463,951)	(0.13)

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	11,549,031,035,260	11,563,926,499,211	(14,895,463,951)	(0.13)
JUMLAH EKUITAS	11,549,031,035,260	11,563,926,499,211	(14,895,463,951)	(0.13)
JUMLAH EKUITAS	11,549,031,035,260	11,563,926,499,211	(14,895,463,951)	(0.13)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	11,549,031,035,260	11,563,926,499,211	(14,895,463,951)	(0.13)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
SATUAN KERJA : (413828) KANTOR UPBU BUDIARTO

Tgl Data : 22/01/26 1:54 AM

Tgl Cetak : 22/01/26 7:21 AM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL

TANGERANG, 22 Januari 2026

Pendamping Jawab UAKPA



NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (413828) KANTOR UPBU BUDIARTO

Tgl Data : 22/01/26 1:54 AM

Tgl Cetak : 22/01/26 7:21 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	16,955,120	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0	84,776
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,532,000	0
0.0	131111	Tanah	11,306,724,000,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	74,467,386,733	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	124,302,375,090	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	412,220,434,384	0
0.0	134112	Irigasi	27,414,757,750	0
0.0	134113	Jaringan	15,303,051,799	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	70,904,161,654
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	26,825,496,240
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	354,695,025,597
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	25,745,420,600
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	3,811,510,953
0.0	138311	Properti Investasi	68,721,250,000	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	1,439,102,500	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	671,775,000	0
0.0	166114	BMN Dalam Proses PMPP	759,125,000	0
0.0	169121	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	0	357,235,296
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	671,775,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	29,782,153,637
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	3,301,274,185	0
0.0	391111	Ekuitas	0	11,563,926,499,211
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	1,341,165
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	58,364,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	31,968,324
3.0	425134	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	118,941,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	7,493,936
3.0	425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	0	3,075,333,193
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,914,552
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	5,478,259,320	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	78,774	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	412,597,470	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	138,701,246	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	40,320,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	155,940,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	34,156,443	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (413828) KANTOR UPBU BUDIARTO

Tgl Data : 22/01/26 1:54 AM

Tgl Cetak : 22/01/26 7:21 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	338,998,020	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	977,377,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	212,100,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	1,034,967,766	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	22,505	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	76,351,590	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	26,012,406	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	14,538,333	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	87,622,165	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	304,376,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	61,630,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	503,293,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	44,175,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	6,953,983,562	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,285,563,568	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	2,667,571,470	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,000,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	218,520,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	174,933,300	0
3.0	521211	Beban Bahan	39,281,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	10,000,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	869,972,627	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	55,654,532	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	52,330,000	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	88,950,142	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,664,032,837	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,347,954,352	0
3.0	523131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	159,828,000	0
3.0	523132	Beban Pemeliharaan Irigasi	118,187,000	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	2,708,932,199	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	28,258,850	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	17,660,560	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,152,847,940	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3,224,476,509	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	10,273,352,676	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	157,832,185	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	392,953,249	0
3.0	592221	Beban Penyusutan Aset Lain-lain	44,654,412	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (413828) KANTOR UPBU BUDIARTO

Tgl Data : 22/01/26 1:54 AM

Tgl Cetak : 22/01/26 7:21 AM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	6,327,250	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNPB	84,776	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	17,039,539	0
JUMLAH			12,080,017,719,134	12,080,017,719,134

Keterangan :

FINAL

TANGERANG, 22 Januari 2026,

Penanggung Jawab UAKPA



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (413828) KANTOR UPBU BUDIARTO

Tgl Data : 22/01/26 12:39 AM

Tgl Cetak : 22/01/26 7:21 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	29,782,153,637
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	3,301,274,185	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	58,364,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	31,968,324
3.0	425134	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	118,941,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	7,493,936
3.0	425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	0	3,079,592,373
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,914,552
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	5,478,259,320	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	79,145	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	412,597,470	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	138,701,246	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	40,320,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	156,020,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	34,156,443	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	338,998,020	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	977,377,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	213,180,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1,034,967,766	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	22,505	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	76,351,590	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	26,012,406	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	14,538,333	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	87,622,165	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	304,376,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	61,630,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	503,293,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	44,175,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	6,953,983,562	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,285,563,568	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,667,571,470	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,000,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	218,520,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	174,933,300	0
3.0	521211	Belanja Bahan	39,281,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	10,000,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	869,972,627	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	55,654,532	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
 WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
 SATUAN KERJA : (413828) KANTOR UPBU BUDIARTO

Tgl Data : 22/01/26 12:39 AM

Tgl Cetak : 22/01/26 7:21 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522113	Belanja Langganan Air	52,330,000	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	88,950,142	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,664,032,837	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,347,954,352	0
3.0	523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	159,828,000	0
3.0	523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi	118,187,000	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	2,708,932,199	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28,258,850	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	17,660,560	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	377,022,600	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	371
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	80,000
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	1,080,000
JUMLAH			33,084,588,193	33,084,588,193

Keterangan :

FINAL

TANGERANG, 22 Januari 2026,

Penanggung Jawab UAKPA



LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 413828
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
BANTEN
KANTOR UPBU BUDIARTO

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 22/01/26 7:21 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 22/1/26 2:37 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4,872,489,000	5,483,260,000	5,478,259,320	0	5,478,259,320	99.91	5,000,680
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	200,000	91,000	79,145	371	78,774	86.56	12,226
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	83,250,000	414,264,000	412,597,470	0	412,597,470	99.6	1,666,530
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	127,040,000	138,777,000	138,701,246	0	138,701,246	99.95	75,754
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	68,320,000	40,520,000	40,320,000	0	40,320,000	99.51	200,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	183,050,000	157,260,000	156,020,000	80,000	155,940,000	99.16	1,320,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	7,860,000	34,257,000	34,156,443	0	34,156,443	99.71	100,557
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	272,010,000	339,998,000	338,998,020	0	338,998,020	99.71	999,980
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,096,512,000	992,984,000	977,377,000	0	977,377,000	98.43	15,607,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	224,620,000	213,195,000	213,180,000	1,080,000	212,100,000	99.49	1,095,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	6,935,351,000	7,814,606,000	7,789,688,644	1,160,371	7,788,528,273	99.67	26,077,727
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	185,304,000	1,038,968,000	1,034,967,766	0	1,034,967,766	99.61	4,000,234
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	70,000	70,000	22,505	0	22,505	32.15	47,495
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	14,420,000	76,753,000	76,351,590	0	76,351,590	99.48	401,410
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	4,897,000	26,913,000	26,012,406	0	26,012,406	96.65	900,594
511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	15,120,000	3,000	0	0	0	0	3,000
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	39,480,000	15,139,000	14,538,333	0	14,538,333	96.03	600,667
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	13,952,000	88,122,000	87,622,165	0	87,622,165	99.43	499,835
511628	Belanja Uang Makan PPPK	70,560,000	311,789,000	304,376,000	0	304,376,000	97.62	7,413,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	41,160,000	61,832,000	61,630,000	0	61,630,000	99.67	202,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	384,963,000	1,619,589,000	1,605,520,765	0	1,605,520,765	99.13	14,068,235
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	80,640,000	594,168,000	503,293,000	0	503,293,000	84.71	90,875,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	6,040,000	46,040,000	44,175,000	0	44,175,000	95.95	1,865,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	86,680,000	640,208,000	547,468,000	0	547,468,000	85.51	92,740,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	6,399,475,000	7,061,733,000	6,953,983,562	0	6,953,983,562	98.47	107,749,438
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	420,000,000	1,290,564,000	1,285,563,568	0	1,285,563,568	99.61	5,000,432
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	6,819,475,000	8,352,297,000	8,239,547,130	0	8,239,547,130	98.65	112,749,870
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	14,226,469,000	18,426,700,000	18,182,224,539	1,160,371	18,181,064,168	98.67	245,635,832
52	BELANJA BARANG							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 413828
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
BANTEN
KANTOR UPBU BUDIARTO

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 22/01/26 7:21 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 22/1/26 2:37 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	4,066,146,000	3,498,397,000	2,667,571,470	0	2,667,571,470	76.25	830,825,530
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	24,000,000	24,000,000	2,000,000	0	2,000,000	8.33	22,000,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	185,400,000	437,040,000	218,520,000	0	218,520,000	50	218,520,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	665,000,000	555,000,000	174,933,300	0	174,933,300	31.52	380,066,700
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	4,965,546,000	4,539,437,000	3,063,024,770	0	3,063,024,770	67.48	1,476,412,230
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	99,281,000	99,281,000	39,281,000	0	39,281,000	39.57	60,000,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	33,120,000	0	0	0	0	0	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	142,401,000	109,281,000	49,281,000	0	49,281,000	45.1	60,000,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	85,000,000	85,000,000	0	0	0	0	85,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	85,000,000	85,000,000	0	0	0	0	85,000,000
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	1,320,000,000	882,700,000	869,972,627	0	869,972,627	98.56	12,727,373
522112	Belanja Langganan Telepon	60,000,000	55,656,000	55,654,532	0	55,654,532	100	1,468
522113	Belanja Langganan Air	48,000,000	52,344,000	52,330,000	0	52,330,000	99.97	14,000
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	144,000,000	90,000,000	88,950,142	0	88,950,142	98.83	1,049,858
522131	Belanja Jasa Konsultan	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,872,000,000	1,380,700,000	1,066,907,301	0	1,066,907,301	77.27	313,792,699
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,632,500,000	2,761,062,000	2,664,032,837	0	2,664,032,837	96.49	97,029,163
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,730,860,000	3,841,006,000	1,347,954,352	0	1,347,954,352	35.09	2,493,051,648
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	160,000,000	160,000,000	159,828,000	0	159,828,000	99.89	172,000
523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi	118,500,000	118,500,000	118,187,000	0	118,187,000	99.74	313,000
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	3,027,222,000	2,711,043,000	2,708,932,199	0	2,708,932,199	99.92	2,110,801
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	7,669,082,000	9,591,611,000	6,998,934,388	0	6,998,934,388	72.97	2,592,676,612
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	649,054,000	649,054,000	28,258,850	0	28,258,850	4.35	620,795,150
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	102,800,000	102,800,000	0	0	0	0	102,800,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	154,750,000	154,750,000	17,660,560	0	17,660,560	11.41	137,089,440
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	906,604,000	906,604,000	45,919,410	0	45,919,410	5.06	860,684,590

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 413828
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
BANTEN
KANTOR UPBU BUDIARTO

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 22/01/26 7:21 AM
 Halaman : 3
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 22/1/26 2:37 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	15,640,633,000	16,612,633,000	11,224,066,869	0	11,224,066,869	67.56	5,388,566,131
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	479,668,000	857,668,000	377,022,600	0	377,022,600	43.96	480,645,400
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	479,668,000	857,668,000	377,022,600	0	377,022,600	43.96	480,645,400
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	479,668,000	857,668,000	377,022,600	0	377,022,600	43.96	480,645,400
	JUMLAH BELANJA	30,346,770,000	35,897,001,000	29,783,314,008	1,160,371	29,782,153,637	82.97	6,114,847,363

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
ESELON I : 05 **DITJEN PERHUBUNGAN UDARA**
WILAYAH/PROVINSI : 2900 **BANTEN**
SATUAN KERJA : 413828 **KANTOR UPBU BUDIARTO**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 22/01/26 7:21 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	58,364,000	0	58,364,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	8,000,000	31,968,324	0	31,968,324	399.6
425134	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	90,000,000	118,941,000	0	118,941,000	132.16
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	7,493,936	0	7,493,936	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	98,000,000	216,767,260	0	216,767,260	221.19
4255	Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika					
425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	2,438,442,000	3,079,592,373	0	3,079,592,373	126.29
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4255	2,438,442,000	3,079,592,373	0	3,079,592,373	126.29
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,914,552	0	4,914,552	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	4,914,552	0	4,914,552	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	2,536,442,000	3,301,274,185	0	3,301,274,185	130.15
	JUMLAH PENDAPATAN	2,536,442,000	3,301,274,185	0	3,301,274,185	130.15